

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Negara*, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta, 1990.
- Abdul Latief, *Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*, Kreasi Total Media Yogyakarta, 2007.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi; suatu studi tentang ajudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif*, Cetakan pertama, Pradnya Paramita Jakarta, 2006.
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan; Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi; paradigma kedaulatan dalam UUD 1945 (pasca perubahan), implikasi dan implementasi pada lembaga negara*, cetakan pertama, setara press, Malang, 2011.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, cetakan kedua, Yapemdo, Bandung, 2000.
- Aziz Syamsudin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Boer Mauna, *hukum Internasional, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005.

- Damos Dumoli Agusman. *Hukum Perjanjian Internasional; Kajian Teori dan Praktek Indonesia*, ctk pertama, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Fatkhurohman, et.al. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditia Bhakti, Bandung, 2004.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh, Roisul Muttaqien, *General Theory of Law and State*, cetakan kesembilan, Nusa Media, Bandung, 2014.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi; Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Edisi revisi, Setara Press, Malang, 2010.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- _____, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Jawahir Thontowi, *Hukum Dan Hubungan Perjanjian Internasional*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Jazim Hamidi. et.al. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta. 2012.
- _____, *Revolusi Hukum Indonesia*, Kerjasama Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- J.G. Starke. *Pengantar Hukum internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie & Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Jimly As-shiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ctk Pertama, Konstitusi Press, Jakarta. 2005.
- _____, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan ketiga, Mahkamah Konstitusi Press, 2006.
- _____, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 2007.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, cetakan pertama, Penerbit Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- M. Ali Syafaat, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cetakan pertama, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.
- Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-undangan*, cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Mochtar Kusumatmaja. *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta., Bandung, 1985.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Ketiga, Sekretariat Negara, Jakarta, 1960.
- Ni'matul Huda dan Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2011.
- _____, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sefriani, *Pengantar Hukum internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, cetakan keempat, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

_____, *Prosedur Perubahan Konstitusi*, PT Alumni, Bandung, 1987.

Syahmin A.K, *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*, Armico, Bandung, 1985.

Utrecht, E., dan Mohammad Salah Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Ichtisar Baru, Jakarta, 1983.

ARTIKEL, JURNAL, DAN MAKALAH

Aminoto dan Merdekawati, “Prospek Penempatan Perjanjian Internasional Yang Mengikat Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015.

Andi Sandi Ant. T.T dan Gustina Merdekawati, “Konsekuensi Pembatalan Hukum Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012.

Bagir Manan, “Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional; Tinjauan Hukum Tata Negara”, Makalah, *Focus Group Padjadjaran*, Bandung, 29 November 2008.

Jimly Ashiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi”, Makalah *The Three “E” Lecture Series*, @america, Pacific Place, Level 3, Jakarta, senin, 18 Juni, 2012.

_____ . “Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi”,

Makalah Ketua Mahkamah Konstitusi RI, diunduh dari www.mk-ri.or.id.

Mahfud MD, “Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan” dalam Makalah yang disampaikan pada seminar konstitusi *Kontroversi UUD 1945 Dan Pengaruhnya Terhadap Ketatanegaraan*, yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Dumos Damoli Agusman, “Apakah MK Bisa Menguji Piagam ASEAN?”, Artikel dimuat *Antara News*, Senin, 25 Juli 2011.

Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional”, *Jurnal Opinio Juris*, Volume 13, Mei-Agustus 2013, hlm. 64.

Wicaksana Dramanda, “Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014.

INSTRUMEN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional

Surat Presiden No.2826/HK/1960 Perihal Pembuatan Perjanjian Dengan Negara Lain.

Putusan MK No. 33/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang No. 38 tahun

2008 tentang Pengesahan perjanjian internasional *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam ASEAN)

Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang

No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun

2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan MK No.97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 236C UU No. 12 Tahun

2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) Huruf e UU No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait kewenangan MK untuk menangani sengketa hasil Pilkada.